

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Progam Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi



APLIKASI HUKUM WAGNER DAN TEORI KEYNES DALAM
PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROVINSI JAWA TIMUR

Tim Peneliti:

MOH. SAIFUL ANAM, S.E., M.M.
ELIKA FEBRIANTI, S.E.
SITI RIZQIYATUL MUNAWAROH
MEI RIA RAHAYU

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 2 Tahun Anggaran 2023/2024

Nomor Kontrak:
037/LPPM-LIT/UB/IV/2024

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2024

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : Aplikasi Hukum Wagner Dan Teori Keynes Dalam Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur
2. **Ketua Peneliti**
 - a. Nama Peneliti : Moh. Saiful Anam, S.E.,M.M.
 - b. NIDN : 0719119101
 - c. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - d. E-mail : anamsaiful9119@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Perencanaan Pembangunan
3. **Anggota Peneliti 1**
 - a. Nama : Erika Febrianti, S.E.
 - b. NIDN/NIM : -
 - c. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - d. E-mail : elikafebriantiFE99@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Perencanaan Pembangunan
- Anggota Peneliti 2**
 - a. Nama (Mahasiswa) : Siti Rizqiyatul Munawaroh
 - b. NIM : 21602011190
 - c. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - d. E-mail : rizkiyatuloke@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Perencanaan Pembangunan
- Anggota Peneliti 3**
 - a. Nama (Mahasiswa) : Mei Ria Rahayu
 - b. NIM : 21602011178
 - c. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - d. E-mail : meiria459@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Perencanaan Pembangunan
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan
6. Lokasi Penelitian : Provinsi Jawa Timur
7. Dana Diusulkan :

Bojonegoro, 23 September 2024

Mengetahui,

Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.
NIDN: 07 2108 8601

MOH. SAIFUL ANAM, S.E., M.M.
NIDN: 0719119101

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Berkah, Rahmat, Karunia dan RidhoNya, tim peneliti dapat menyusun Laporan Penelitian yang berjudul: “Aplikasi Hukum Wagner Dan Teori Keynes Dalam Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur”. Laporan Penelitian ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Kelompok Dosen dengan Mahasiswa di lingkungan Universitas Bojonegoro. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Rektor Universitas Bojonegoro yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Aplikasi Hukum Wagner Dan Teori Keynes Dalam Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur”
2. Bapak/Ibu Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Bojonegoro atas kepercayaan dan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.
3. Ibu Dekan beserta Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro atas curahan semangat serta kepercayaan dan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.
4. Ibu Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bojonegoro beserta unsurnya yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.
5. Bapak/Ibu para Dosen senior dan rekan-rekan di Universitas Bojonegoro yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Akhirnya, peneliti mengharapkan agar Laporan Penelitian ini dapat memenuhi fungsinya sebagai khasanah ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu ekonomi. Peneliti menyadari pula bahwa Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan, guna perbaikan dan penyempurnaan Laporan Penelitian ini. Peneliti tak lupa menyampaikan permohonan maaf jika dalam penulisan Laporan Penelitian ini terdapat kekeliruan dan kekurangan. Demikian, dan terima kasih.

Bojonegoro, September 2024

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori	8
2.2. Penelitian Terdahulu	11
2.3. Kerangka Konsep Penelitian	14

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
3.2. Lokasi Penelitian	16
3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	16
3.4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	17
3.5. Analisis Data	18

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur	27
6.2 Hasil dan Analisis	30
6.3 Pembahasan	40

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	46
5.2 Rekomendasi	47

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 Variabel Tingkat Kemiskinan	31
Tabel 4.2 Variabel Pertumbuhan Ekonomi	32
Tabel 4.3 Variabel Pengeluaran Pemerintah	32
Tabel. 4.4 Penentuan Panjang <i>Lag Optimum</i>	33
Tabel 4.5 Hasil Uji Stabilitas Model VAR	34
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Vector Autoregressive</i> (VAR)	35
Tabel 4.6 Hasil Uji Kausalitas	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Persen)	3
Gambar 1.2 Persebaran Jumlah Penduduk Miskin di Seluruh Provinsi Pulau Jawa di Indonesia Tahun 2017-2021 (persentase).	5
Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti <i>Submit</i> Artikel	50
Lampiran 2. Revisi Jurnal	51
Lampiran 3. OJS Terindeks SINTA	52
Lampiran 4. Pengajuan Dana Penelitian Internal Perguruan Tinggi	53

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Konteks Pembangunan ekonomi regional sangat luas dan menyebar diberbagai aspek. Pada Penelitian ini akan mengkaji pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dengan dua teori yaitu Hukum Wagner dan Teori Keynes. Hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah permasalahan yang tidak pernah habis untuk dibahas dan diperdebatkan dalam lingkup perekonomian suatu negara. Hubungan tersebut dapat dikaji lewat dua pandangan. Hukum Wagner memandang bahwa pengeluaran pemerintah merupakan dampak dari perkembangan ekonomi, sedangkan Hipotesis Keynes berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah merupakan alat kebijakan fiskal untuk meningkatkan perekonomian. Penelitian ini menggunakan uji ARDL untuk menguji hubungan jangka panjang, serta model *Error Corection Model* untuk menganalisis adanya hubungan jangka pendek. Adapun *tools* yang digunakan dalam menganalisis data adalah Eviews 12.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) variabel belanja langsung (BL) berpengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (PE) dalam jangka pendek dan memiliki pengaruh negatif dalam jangka panjang di Provinsi Jawa Timur. (ii) Variabel belanja tidak langsung (BTL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (PE) dalam jangka pendek dan memiliki pengaruh positif dalam jangka panjang di Provinsi Jawa Timur. (iii) Variabel pembentukan modal tetap bruto (PMTB) berpengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (PE) di Provinsi Jawa Timur dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. (iv) variabel tenaga kerja (TK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (PE) dalam jangka pendek dan memiliki pengaruh negatif dalam panjang di Provinsi Jawa Timur. (v) Berdasarkan pada analisis data menunjukkan bahwa terdapat hubungan kasualitas satu arah antara belanja langsung (BL) dan belanja tidak langsung (BTL) terhadap pertumbuhan ekonomi (PE) sehingga penelitian ini mendukung Teory Keynes.

Kata Kunci : Pertumbuhan_Ekonomi, Tingkat_Kemiskinan, Pengeluaran_Pemerintah, ARDL, ECM.

BAB I

PENDAHULUAN

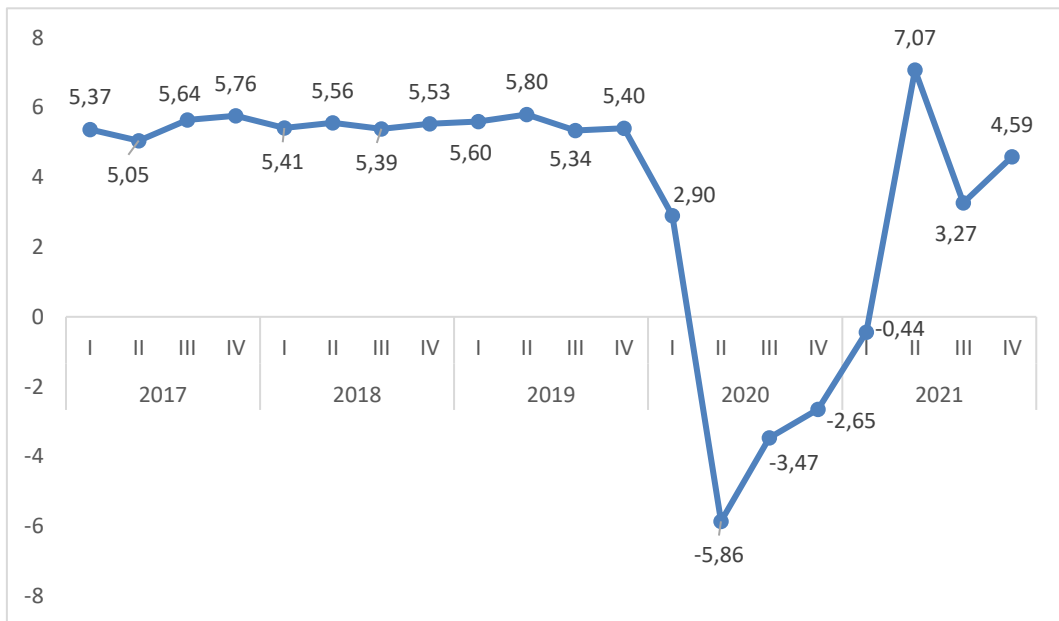
1.1 Latar Belakang

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah permasalahan yang tidak pernah habis untuk dibahas dan diperdebatkan dalam lingkup perekonomian suatu wilayah bahkan negara. Perdebatan ini dimulai kisaran pada akhir periode 1800 dengan ditemukan banyaknya bukti empiris yang mengeksplorasi hubungan kausalitas kedua variabel makro ekonomi dan menemukan hasil yang berbeda atau bertolak belakang. Kaitanya untuk melihat kedua hubungan ini antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan dua perspektif yang berbeda. Pendapat yang pertama, untuk pertama kali dikemukakan oleh Adolph Wagner seorang ekonom Jerman pada abad ke-19 yang merumuskan suatu hukum yaitu hukum wagner (Wagner Law) yang berpendapat bahwa besarnya pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dimana semakin maju suatu perekonomian, maka ukuran pemerintah juga akan semakin besar dimana ukuran pemerintah tersebut diukur dengan besarnya pengeluaran pemerintah (Wagner, 1958). Pandangan selanjutnya menentang kebalikannya, pendapat ini dikemukakan oleh Keynes menjelang permulaan abad ke-20, sehingga disebut Teori Keynes. Menurut pandangan Keynes, pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dimana pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi menyebabkan peningkatan permintaan agregat, dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2007).

Mengacu pada dua cara pandang tersebut, maka penelitian ini akan menguji Hukum Wagner dan Teori Keynes di Provinsi Jawa Timur pada periode 2011-2020, Dengan fokus utama pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) dari waktu ke waktu. PDB merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara. Angka PDB menyatakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode waktu

tertentu. Gambar 1.1 memberikan gambaran perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2021.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Jawa Timur, 2022

Gambar 1.1 diatas menggambarkan terjadi fluktuasi dalam laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2017-2021. Pertumbuhan ekonomi cukup stabil secara bertahap pada kurun waktu tahun 2017 sampai pada tahun 2019 sebesar 5.40%. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 triwulan pertama terjadi akibat berbagai indikator yang salah satunya adalah ekonomi global yang meliputi keadaan perang dagang antara AS-China, tensi geopolitik Timur Tengah dan fluktuasi harga komoditas, disusul juga terjadinya penurunan pada tahun 2020 diakibatkan pandemi Covid-19 yang memberikan dampak negatif di seluruh perekonomian dunia, tidak terkecuali Indonesia dan membawa kontraksi yang sangat buruk dimana terjadi pertumbuhan negatif di seluruh komponen kecuali pengeluaran pemerintah.

Hubungan kausalitas pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh (Burta, 2018) bahwa pemerintah harus lebih

memperhatikan struktur sosial ekonomi agar dapat lebih efisien sehingga mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan dalam hal ini masyarakat dapat mengoptimalkan pengeluaran pemerintah dalam bentuk subsidi maupun pembangunan ekonomi lainnya atas berbagai manfaat yang diterima dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan penelitiannya menunjukkan terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang dilakukan pemerintah, yaitu jika pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 1994). Struktur pengeluaran terbagi menjadi dua, yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Perkembangan pengeluaran pemerintah yang diukur dari besarnya belanja langsung dan tidak langsung. Pengklasifikasian belanja langsung dan tidak langsung ini digunakan dalam sistem penganggaran pemerintah baik pusat maupun daerah berdasarkan (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Penelitian terkait pembuktian Hukum Wagner dan Teori Keynes di Indonesia belum banyak dilakukan. Sukartini, (2012) melakukan pengujian dengan judul Pengujian Hukum Wagner Dalam Perekonomian Indonesia Kajian Pengeluaran Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi menggunakan data time series yang menyimpulkan berlakunya Hukum Wagner di Indonesia. Walaupun demikian, penelitian ini belum secara tegas menyebutkan apakah Teori Keynes tidak terjadi di Indonesia. Sementara itu Pasaribu dan Septriani, (2021) melakukan pengujian Wagner's Law Versus Keynesian Hypothesis. Hasilnya menunjukkan bahwa di Indonesia terbukti Wagner's Law terjadi pada tingkat regional, dimana belanja pemerintah dipengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji hubungan dengan Aplikasi Hukum Wegner dan Teori Keynes antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian dari banyak peneliti sebelumnya dan menghasilkan dua pendapat mengenai hubungan antara kedua variabel. Keynes dan para pendukungnya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sementara Hukum Wagner (Wagner's Law) menyatakan bahwa peningkatan perekonomian yang terjadi mempengaruhi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Berbagai penelitian mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan simpulan beragam yang menciptakan pendukung untuk masing-masing teori.

Menurut Todaro, (2011) pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pertumbuhan penduduk, angkatan kerja, dan akumulasi modal. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji Hukum Wagner dan Teori Keynes di lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan memanfaatkan data untuk periode 2011-2020. Penelitian ini fokus pada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara khusus juga penelitian ini mempertimbangkan untuk menambahkan variabel modal investasi yang diwakilkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan tenaga kerja. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian diformulasikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
3. Hipotesis apa yang berlaku terkait hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur hipotesa Hukum Wagner atau Teori Keynes?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Menganalisis pengaruh belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur
2. Menganalisis pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur
3. Menganalisis hipotesis apa yang akan berlaku terkait hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur hipotesa Hukum Wagner atau Teori Keynes.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dan menjadi manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

a) Manfaat Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara luas khususnya memberikan wawasan tentang keilmuan ekonomi studi pembangunan dalam bidang perencanaan dan pembangunan regional. Terutama pembahasan pada kajian pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi (dibuat) sumber referensi atau bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam upaya mewujudkan penelitian yang lebih baik serta berkelanjutan.

b) Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini sebagai sarana bagi penulis dalam mengemukakan pendapat tentang suatu permasalahan tertentu dalam bentuk sistematis serta mampu memberikan solusi permasalahan tersebut

berdasarkan metode ilmiah. Terdapat harapan pula yang dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam peningkatan kualitasnya, khususnya dalam hal kajian yang ditinjau dari pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur. Serta penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, pengeluaran tersebut bertujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengeluaran konsumsi pemerintah yang biasa hanya disebut pengeluaran pemerintah, *government expenditure* atau *government purchase* meliputi semua pengeluaran dimana pemerintah secara langsung menerima balas jasanya (Donkor et al., 2022). Dari beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai konsumsi pemerintah, kegiatan-kegiatan dan pengeluaran lainnya guna tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam cakupan makro, Rostow dan Musgrave dalam Uswatun Hasanah et al., (2022) mengembangkan model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang menghubungkan pengeluaran pemerintah menjadi tiga tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Dimana pada tahap awal, untuk memajukan perekonomian membutuhkan investasi besar sehingga pemerintah mengambil peran penyedia prasarana seperti kesehatan, pendidikan transportasi dan sebagainya. Tahap menengah, pada tahap ini peran investasi dari pemerintah masih dibutuhkan agar memudahkan perekonomian mencapai tahap tinggal landas, namun pada tahap ini peran investasi swasta sudah membesar sehingga menimbulkan kegagalan pasar yang menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dengan

kualitas yang lebih baik dan dalam jumlah yang lebih banyak. Tahap lanjut, pada tahap ini peran pemerintah beralih dari penyedia prasarana ke pengeluaran untuk kegiatan sosial seperti program pelayanan kesehatan, program jaminan pendidikan dan kesejahteraan hari tua (Zhuchenko et al., 2023)

Pengeluaran daerah diperoleh dari seluruh pendapatan daerah yang diterima baik dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat yang akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, 2021).

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tidak bisa lepas dari modal atau tenaga kerja dan teknologi. Penyediaan sumber daya modal sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Sumber dana ini diwujudkan dalam bentuk penanaman modal (Investasi). Hal ini sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi,

maupun kesempatan kerja. Penelitian Sari et al., (2021) Dana investasi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat (swasta), pinjaman luar negeri serta investasi swasta asing (Sukirno, 2002).

Menurut pendapat Adolf Wagner menjelaskan hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah yakni mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19. Secara relatif, pengeluaran pemerintah dijelaskan dalam hukum Wagner adalah dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hasilnya terbukti menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Kecenderungan ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah (*law of ever increasing state activity*) (Donkor et al., 2022)

Hal itu sejalan dengan gagasan Keynes dalam Suparmoko (2004), Kim (1997) dan Miller (1997) bahwa pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan kesempatan kerja, dimana dapat dijelaskan dari sudut pandang, yaitu teori Keynes menyanggah teori klasik. Teori klasik mengemukakan pandangan mereka mengenai kesempatan kerja, yaitu bahwa tingkat output dan harga keseimbangan hanya bisa dicapai kalau perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*). Sementara, bagi Keynesian keseimbangan dengan tingkat kesempatan kerja penuh (*equilibrium with full employment*) tidak akan bisa dicapai melalui mekanisme pasar bebas semata, mesti didorong dengan pengeluaran pemerintah. Jadi, adanya mekanisme pasar yang bekerja secara bebas dengan campur tangan pemerintah

melalui pengeluaran pemerintah, misalnya dengan pembangunan infrastruktur, dapat menstimulan masuknya investasi dan meningkatkan kesempatan kerja sehingga berpengaruh pada tingkat kemiskinan (Tampubulon et al., 2022).

2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Menurut Mubyarto (1998), kemiskinan adalah situasi serba kekurangan disebabkan oleh terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan ketrampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Jadi kemiskinan yaitu suatu kondisi ketidakmampuan dan ketidakberdayaan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, dan berimplikasi pada keterbelakangan demikian seterusnya.

Menurut teori Nurkse (Kuncoro 1997:107) Kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan kemiskinan, adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan Sumber daya manusia menyebabkan produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas akan mengakibatkan pendapatan ikut rendah, rendahnya produktivitas mengakibatkan pendapatan yang di terima rendah, pendapatan yang rendah mengakibatkan investasi dan tabungan menurun. Jika pendapatan terus menurun mengakibatkan kemiskinan karena modal untuk

mencukupi kebutuhan hidup tidak maksimal. berikut gambar Lingkaran Setan Kemiskinan yang di kemukakan oleh Ragnar Nurkse.

Adapun menurut Chambers dalam Nasikun (2001), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan Absolut, yaitu: pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, dan kesehatan pendidikan yang dioerlukan untuk bisa hidup berkelanjutan.
- b. Kemiskinan Relatif, yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
- c. Kemiskinan Kultural, yaitu mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d. Kemiskinan Struktural yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi menyebabkan suburnya kemiskinan (Hidayat dkk, 2017).

Memperhatikan definisi dan faktor penyebab kemiskinan di atas, akhirnya muncul kebijakan-kebijakan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin melalui:

bantuan sosial, peningkatan nilai tambah barang dan jasa agar pendapatan daerah menjadi naik, serta fasilitas pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini untuk meningkatkan kemakmuran dalam kesejahteraan umum. Kesejahteraan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan, material, spiritual dan sosial suatu penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Kesejahteraan umum dan kemiskinan memiliki hubungan negatif (Ginting, 2019).

2.1.4 Teori Rostow dan Mangrove

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan atas tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam presentase GNP akan bertambah besar, sedangkan presentase investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil (Colm & Musgrave, 1960).

1. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sehingga pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.
2. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang

semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit.

3. Pada tahap lanjut, Rostow berpendapat bahwa pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk layanan sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Sementara itu, Dalam satu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi swasta terhadap GNP semakin besar. Tetapi rasio investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil.

2.1.3. Hukum Wagner

Pengamat empiris oleh Adolf Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap PDB dengan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB (Dumairy, 1997).

Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang

timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Mangkoesoebroto, 1994).

Temuannya kemudian oleh Richard A. Musgrave dinamakan Hukum Pengeluaran Pemerintah yang selalu Meningkat (*The Law of Growing Public Expenditure*). Sedangkan Wagner sendiri menamakannya sebagai Hukum Wagner yaitu Hukum Aktivitas Pemerintah yang selalu Meningkat (*The Law of Ever Increasing State Activity*) (Dumairy, 1997).

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, akan tetapi dalam pandangannya tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah dalam pengertian pertumbuhan secara relatif ataukah secara absolut. Apabila yang dimaksud oleh hukum Wagner adalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif sebagaimana teori Musgrave, maka hukum Wagner adalah sebagai berikut: dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian pasti membutuhkan berbagai penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian, berkaitan dengan hal tersebut peneliti mencantumkan penelitian – penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagaimana pada table 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Nama dan Tahun Peneliti	Metode Penelitian	Variabel atau Instrumen	Hasil Penelitian
1	<i>Economic growth and government spending in Malaysia: a re-examination of Wagner and Keynesian views</i> (Govindaraju et al., 2011)	<i>Auto Regressive Distributed Lag</i> (ARDL)	• pengeluaran pemerintah • pengeluaran pemerintah (Pendidikan) • Pertumbuhan ekonomi (PDB)	Hasil penelitian ini dalam konteks model bivariat menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah agregat menyebabkan PDB riil yang mendukung hukum Wagner. Namun, dalam kerangka multivariat, penulis menemukan dukungan untuk hipotesis Keynes yang menunjukkan bahwa bias variabel yang dihilangkan dapat secara signifikan mengubah validitas hukum Wagner
2	<i>Wagner's Law versus Keynesian Hypothesis: Evidence from pre-WWII Greece</i> (Antonis et al., 2013).	<i>Auto Regressive Distributed Lag</i> (ARDL)	• Belanja publik • GDP perkapita	Hasil menunjukkan efek kausal jangka panjang yang positif dan signifikan secara statistik berjalan dari kinerja ekonomi terhadap ukuran publik yang mendukung Hukum Wagner di Yunani, sedangkan untuk hipotesis Keynesian beberapa keraguan muncul untuk sub-periode waktu tertentu.
3	<i>Testing The Validity Of Wagner's Law In Bolivia: A Cointegration And Causality Analysis With Disaggregated Data</i> (Bojanic, 2013).	<i>Error Corection Model</i> (ECM)	• pengeluaran riil untuk infrastruktur • pengeluaran riil untuk kesehatan • pengeluaran riil untuk pendidikan • pengeluaran riil untuk pertahanan • Pertumbuhan ekonomi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pengeluaran infrastruktur, kesehatan, dan pertahanan dapat dijelaskan dalam kerangka Hukum Wagner. Secara keseluruhan, kausalitas Granger dua arah ditemukan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah dalam enam dari sembilan versi undang-undang tersebut. Namun, pengaruh pendapatan pada berbagai indikator pengeluaran pemerintah tampak lebih kuat, memberikan kepercayaan pada proposisi Wagner.
4	Kausalitas antara Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan	<i>Panel Vector Error Correction Model</i> (PVECM) dan <i>panel</i>	Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia	(1) Terdapat hubungan jangka panjang yang positif antara indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada jangka pendek terdapat hubungan negatif pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks

No	Judul Penelitian, Nama dan Tahun Peneliti	Metode Penelitian	Variabel atau Instrumen	Hasil Penelitian
	Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Uswatun Hasanah et al., 2022)	<i>granger causality test</i>		pembangunan manusia. Kemudian terdapat hubungan positif antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi. (2) Hasil <i>Granger causality test</i> menyebutkan bahwa terdapat kausalitas dua arah (<i>bidirectional causality</i>) antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia, kemudian antara pengeluaran pemerintah dan IPM. Selanjutnya terdapat kausalitas satu arah (<i>unidirectional causality</i>) antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.
5	Analisis Kausalitas Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Adriani, 2022)	<i>Panel Vector Autoregression (PVAR)</i> dan <i>Granger Causality Test</i>	Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi	(1) terdapat kausalitas satu arah dari variabel penerimaan pajak kepada variabel pengeluaran pemerintah; (2) terdapat kausalitas satu arah dari variabel pertumbuhan ekonomi kepada variabel pengeluaran pemerintah; (3) Tidak terdapat hubungan kausalitas antara variabel penerimaan pajak dan variabel pertumbuhan ekonomi.
6	Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Modal di Provinsi Jambi (Sari et al., 2021)	Granger causality analysis method	Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Modal	Terdapat hubungan jangka panjang antar variabel penelitian. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan sebab akibat satu arah dengan IPM. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan pasokan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia pada gilirannya akan mendorong pembangunan manusia yang lebih baik. Variabel belanja modal mempunyai hubungan sebab akibat satu arah dengan variabel pertumbuhan ekonomi. Alokasi modal untuk pelaksanaan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dan menjadi stimulus perekonomian di Provinsi Jambi.
7	Interelasi Pengeluaran Pemerintah dan Kesempatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi	Kuantitatif	Pemerintah dan Kesempatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Prob (0,001). Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Prob (0,008). Kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Prob (0,002). Kesempatan kerja

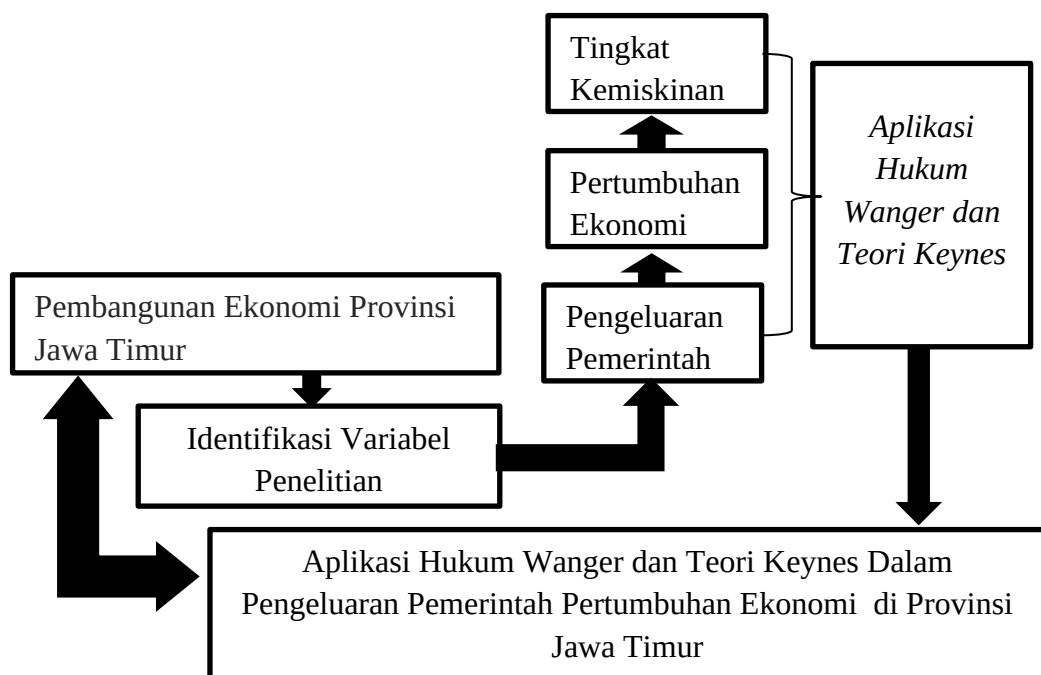
No	Judul Penelitian, Nama dan Tahun Peneliti	Metode Penelitian	Variabel atau Instrumen	Hasil Penelitian
	Kalimantan Tengah (Sari et al., 2021)			berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Prob (0,004). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Prob (0,001). Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Prob (-0.724). Kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui mediasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Prob (1.198).
8	Analisis Kausalitas antara Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera (Hanifah et al., 2017)	<i>Granger Causality model</i>	Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi	Tidak ada hubungan dua arah dari 10 provinsi di Sumatera. Tapi ada satu arah hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, yang ditemukan di Provinsi Barat Provinsi Sumatera dan Bengkulu. Sedangkan 8 provinsi lainnya tidak terdapat hubungan sebab akibat satu arah dan dua arah hubungan.
9	Kausalitas dan Kointegrasi antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Kurun Waktu 1083 – 2014 (Hanifah et al., 2017)	<i>Cointegrasi test dan Granger Causality test</i>	Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan	hasil uji kointegrasi mengindikasikan bahwa diantara perubahan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan stabilitas/keseimbangan dan kesamaan pergerakan dalam jangka panjang. Hasil uji kausalitas granger diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran langsung pemerintah yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0054 lebih kecil dari 1% begitu juga dengan pengeluaran tidak langsung pemerintah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0002 lebih kecil dari 1%. Dari hasil diatas maka untuk Provinsi Riau tidak berlaku hubungan timbal balik antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tetapi hanya terjadi hubungan searah yaitu pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pemerintah baik pengeluaran langsung maupun tidak langsung.

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah, 2023.

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep penelitian merupakan rangkaian kerangka kerja yang menggambarkan landasan teoritis dan konseptual suatu penelitian yang akan dilaksanakan. Fungsinya adalah untuk memberikan arah dan struktur bagi penelitian dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama yang akan diselidiki, menguraikan hubungan antara konsep-konsep tersebut, dan menyajikan landasan teori yang mendukung hipotesis atau pertanyaan penelitian. Dengan demikian, kerangka konsep membantu peneliti dalam merancang metodologi, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menyusun kesimpulan, sehingga memungkinkan penyelidikan ilmiah yang lebih terarah dan bermakna Sugiyono (2018) dalam (Hanifah et al., 2017). Berikut merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian



Sumber: Diolah (2023)

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi nomor tiga di pulau jawa pada tahun 2021 berdasarkan data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Ditambah data pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu tertinggi diantara provinsi lainnya di Indonesia. Hal tersebut menjadi kesatuan dalam pembahasan penelitian ini yang konteksnya pada proses Pembangunan ekonomi regional. Ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki dapat menjadi harapan dan tantangan baik untuk generasi saat ini maupun masa yang akan datang. Keterkaitan peran pemerintah dalam belanja modal atau pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan dampak yang baik terhadap tingkat kemiskinan secara simetris atau asimetris khususnya di Provinsi Jawa Timur.

Peran pemerintah sangat erat kaitanya dalam kondisi sosial, ekonomi, politik suatu wilayah yang tercantum dalam Pembangunan ekonomi. Aspek Pembangunan ekonomi tidak menutup kemungkinan melibatkan keberadaan pemerintah selain sebagai stabilitator juga sebagai penyedia barang publik yang dikonsumsi Masyarakat. Pengeluaran pemerintah dalam hal ini yang relefan dalam kaitanya dengan prosen Pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga ditambah instrument penelitian yaitu pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi sudah menjadi indicator umum dalam melihat ketercapaian atau keberhasilan Pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dalam waktu 10 tahun terakhir bisa di nyatakan positif. Hal ini sejalan atau tidak dengan kondisi sosial ekonomi

Masyarakat, yaitu tingkat kemiskinannya. Berkaitan dengan uraian ini menjadi alasan lebih khusus untuk melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui kausalitas pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis uraikan diatas maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan pada hipotesis. Hipotesis adalah jawaban (dugaan) awal yang masih bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti kebenarannya, melalui data yang terkumpul dan setelah dilakukan pengujian atas kebenarannya. Berdasarkan landasan teoritis, kajian empiris, dan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga belanja langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Diduga belanja tidak langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Diduga pembentukan modal tetap bruto berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Diduga tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan Sugiyono (2018) dalam (Azwar, 2016).

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat Asosiatif (Hubungan), yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan timbal balik antara variabel bebas yaitu Pengeluaran Pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Dengan penelitian ini, maka akan dapat dibangun teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala yang akan dan sudah terjadi.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur, dikarenakan Provinsi Jawa Timur sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan tinggi. Adapun hal ini ditinjau juga dengan pengeluaran pemerintah. Lokasi penelitian ini sesuai dengan domisili semua anggota peneliti sehingga mempermudah koordinasi serta memenuhi kebutuhan peneliti untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dan memahami alur penelitian lebih efektif.

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adanya 38 kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu yaitu data pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu ((Maulana et al., 2020).

Prose penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* maka ditetapkan oleh peneliti beberapa kriteria yang digunakan sebagai sampel yaitu data pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan pada tahun 2012 - 2021 yang telah tersusun dalam bentuk angka yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Jawa Timur. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan sampel sepuluh tahun terakhir yaitu tahun 2012 - 2021.

3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data Kuantitatif merupakan data-data yang penyajiannya dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*). Data-data kuantitatif dalam penelitian ini menganalisis hubungan timbal balik pengeluaran pemerintah, Pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur baik secara

simultan maupun parsial. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelolanya tetapi dapat dimanfaatkan oleh penelitian tertentu (Sugiyono). Data sekunder berasal dari sumber internal maupun eksternal. Dalam hal ini, data sekunder yang bersifat internal didapat melalui data-data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur yaitu data Pengeluaran Pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan tahun 2012-2021 berupa data runtut waktu (*time series*). Adapun data yang bersifat eksternal didapat melalui sumber-sumber di luar instansi yang dipublikasikan dan juga jurnal, artikel dan internet. Dalam hal ini yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan Teknik pengambilan data Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan (Sugiyono, 2018). Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada, Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

3.5 Analisis Data

Metode analisis adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel tidak bebas (*dependent variable*). Dalam penelitian ini terdapat beberapa langkah analisis, yang meliputi uji stasioneritas, uji kointegrasi bound testing, metode ARDL-ECM (*Autoregressive Distributed Lag-Error Correction Model*), uji Granger, uji asumsi klasik, serta uji statistik.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas, di mana output merupakan fungsi tenaga kerja dan modal, sedangkan tingkat kemajuan teknologi merupakan variabel eksogen. Asumsi yang dipakai dalam model neoklasik adalah constant return to scale, adanya substitusi antara modal dan tenaga kerja dan adanya penurunan dalam tambahan produktivitas.

Penelitian ini menerapkan pendekatan *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) yang diperkenalkan oleh Pesaran, M. H., Shin, (1999) untuk menguji keberadaan kointegrasi antar variabel dan juga untuk memperkirakan koefisien jangka panjang dan jangka pendek dari variabel-variabel tersebut. Berbeda dengan pendekatan kointegrasi Johansen yang menggunakan sejumlah persamaan untuk menganalisis hubungan jangka panjang, ARDL hanya mengadopsi satu persamaan. Penerapan ARDL dan uji Granger kausalitas dapat membantu dalam menghindari masalah yang terkait dengan mengestimasi jangka waktu data series. Tidak ada suatu ketentuan untuk pra-tes variabel dalam penggunaan ARDL selama variabel mampu mencapai stasioneritas pada diferensial pertama atau di bawahnya. Pesaran, (1999) menunjukkan bahwa dengan menggunakan kerangka pemikiran ARDL,

parameter pada estimasi hubungan jangka pendek akan konsisten dan koefisien pada estimasi hubungan jangka panjang akan sangat konsisten pada ukuran sampel yang kecil. Sebagai tambahan, Pesaran, (1999) menyatakan bahwa ARDL dapat mengoreksi residual dan masalah variabel endogen secara bersamaan. Dalam menentukan persamaan regresi, masing-masing variabel akan diestimasi dengan memasukkan lag jangka panjang dan jangka pendek hingga ditemukan model yang terbaik, yaitu model dengan variabel yang signifikan. Untuk menghasilkan model terbaik ini, digunakan metode *general to specific*, yaitu dengan menghilangkan variabel yang tidak signifikan. Dengan metode ini, satu per satu variabel yang memiliki nilai probabilitas yang tidak signifikan dan paling besar akan dihilangkan.

3.6 Uji Asumsi Klasik

Terdapat beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh model agar model tersebut menjadi sebuah estimator yang baik dan tidak bias atau biasa disebut dengan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Gujarati dan Porter, (2009) menyebutkan bahwa kesepuluh asumsi tersebut yang harus dipenuhi yaitu pertama, model persamaan berupa non-linear. Kedua, nilai variabel independen tetap meskipun dalam pengambilan sampel yang berulang. Ketiga nilai rata-rata penyimpangan sama dengan nol. Keempat, *homokedastisity*. Kelima tidak ada *autokorelasi* antara variabel. Keenam, nilai *covariance* sama dengan nol. Ketujuh, jumlah observasi harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diestimasi. Kedelapan, nilai variabel independent yang bervariasi. Kesembilan, model regresi harus memiliki bentuk yang jelas. Kesepuluh adalah tidak adanya *multikolinieritas* antar variabel independen. Terpenuhinya kesepuluh asumsi di atas menjadikan hasil

regresi memiliki derajat kepercayaan yang tinggi. Dengan pemakaian, metode *Ordinary Least Squared* (OLS), untuk menghasilkan nilai parameter model penduga yang lebih tepat, maka diperlukan pendeteksian apakah model tersebut menyimpang dari asumsi klasik atau tidak, deteksi tersebut terdiri dari:

a. Uji *Multikolinearitas*

Uji *multikolinearitas* digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (*independent variable*). *Multikolinearitas* merupakan suatu keadaan di mana terdapat hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau seluruh variabel yang menjelaskan model regresi (Gujarati dan Porter, 2009). Adanya *multikolinearitas* mengakibatkan kesulitan dalam melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dalam penelitian ini pengujian adanya *multikolinieritas* dengan menggunakan uji efisiensi korelasi (r). Jika koefisien korelasi diatas 0.8 maka diduga terjadi *multikolinieritas* dalam model. Akan tetapi selaim bahwa pacarmudiduga terjadi *multikolinearitas* dalam model. Namun jika koefisien relatif rendah maka diduga tidak terjadi multikolinieritas dalam model rendah Hipotesis:

H_0 = Tidak Ada Multikolinearitas

H_1 = Ada Multikolinearitas

Jika $r < 0.8$ (tidak ada multikolinearitas)

Jika $r > 0.8$ (ada multikolinearitas)

Adapun cara untuk mengatasi masalah adanya multikolinearitas yaitu dengan melihat informasi sejenis yang aga, mengeluarkan variabel bebas yang kolinier dari model, mentransformasikan variabel, serta mencari data tambahan.

b. Uji Autokorelasi

Menurut Gujarati dan Porter (2009), *autokorelasi* didefinisikan sebagai korelasi antar anggota seri observasi yang disusun menurut waktu (*data time series*) dan menurut ruang (*data cross-section*). *Autokorelasi* merupakan suatu keadaan di mana faktor kesalahan pada periode tertentu berkorelasi dengan faktor kesalahan pada periode lainnya. Pada umumnya, *autokorelasi* banyak terjadi pada data *time series*, meskipun dapat juga terjadi pada data *cross-section*. Hal ini disebabkan karena pada data *time series*, observasi diurutkan menurut waktu secara kronologis, sehingga besar kemungkinan akan terjadi *autokorelasi* antar observasi, atau dengan kata lain nilai observasi akan dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Dalam penelitian ini digunakan *Breusch-Godfrey LM Test* untuk mendekteksi permasalahan *autokorelasi*. Untuk mengetahui ada tidaknya *autokorelasi* di dalam model dapat dilihat dari probabilitas *chi-square* (X^2) yang dibandingkan dengan nilai kritis pada tingkat signifikansi (α) tertentu. Hipotesis dalam pengujian ini yaitu:

H0: tidak terdapat *autokorelasi*

H1: terdapat *autokorelasi*

Kriteria uji *Breusch-Godfrey LM* adalah:

1. Probabilitas *chi-square* (χ^2) < taraf nyata α , maka H₀ ditolak
2. Probabilitas *chi-square* (χ^2) > taraf nyata α , maka H₀ diterima

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan model tidak efisien dan akurat, yang diakibatkan oleh eror atau *residual* model yang

diamati tidak memiliki varian yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Dalam penelitian ini, pengujian *heteroskedastisitas* dilakukan dengan *White Heteroscedasticity Test* (Gujarati dan Porter, 2009). Nilai probabilitas *chi-square* (χ^2) dijadikan sebagai acuan untuk menolak atau menerima H_0 , Hipotesis yang akan diuji:

H_0 : tidak terdapat *heterokedasitas*.

H_1 : terdapat *heterokedastisitas*.

Kriteria uji *white* adalah:

1. Probabilitas *chi-square* (χ^2) < taraf nyata α , maka H_0 ditolak
2. Probabilitas *chi-square* (χ^2) > taraf nyata α , maka H_0 diterima

3.3.5 Uji Statistik

Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui signifikansi koefisien regresi yang diperoleh. Uji ini dilakukan melalui penggunaan uji statistik seperti nilai-t dan nilai-F serta koefisien determinasi. Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah hasil perhitungan tersebut signifikan atau tidak secara statistik.

Menurut Kuncoro (2011), pengujian hipotesis dapat diukur dengan nilai t-statistik, nilai F-statistik, dan koefisien determinasi. Nilai statistik t digunakan untuk menguji signifikansi individu dari setiap koefisien regresi. Jika nilai t signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan nilai statistik F digunakan untuk menguji signifikansi keseluruhan model regresi. Jika nilai F signifikan, maka seluruh model regresi dapat dianggap valid.

a. Koefisien *Determinasi* (R^2)

Koefisiensi *Determinasi* merupakan kadar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat (r^2, R^2). Nilai ini menyatakan proporsi variasi keseluruhan dalam nilai variabel dependen yang dapat diterangkan atau diakibatkan oleh hubungan linier dengan variabel independen. Dalam hubungannya dengan kolerasi, maka r^2 merupakan kuadrat dari koefisien kolerasi yang berkaitan dengan variabel bebas (X) dan variabel (Y). Secara umum dikatakan bahwa r^2 merupakan kuadrat kolerasi antara variabel yang digunakan sebagai prediktor (X) dan variabel yang memberikan respon (Y).

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t statistik)

Pengujian dengan uji-t dilakukan dengan cara membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Uji ini dilakukan dengan syarat:

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis tidak teruji artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis teruji artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian juga dilakukan dengan pengamatan nilai signifikan t pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). Analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi t dengan nilai signifikansi 0,05, dimana syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a) Jika signifikansi, $t < 0,05$ maka hipotesis teruji, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- b) Jika signifikansi $t > 0,05$ maka hipotesis tidak teruji, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji-F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian uji-F dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Uji ini dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hipotesis tidak teruji, artinya variabel-variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis teruji, artinya variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

F pada tingkat α yang digunakan penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%. Analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi 0,05, dimana syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a) Jika signifikansi, $F < 0,05$ maka hipotesis teruji, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika signifikansi $F > 0,05$ maka hipotesis tidak teruji, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan model ARDL-ECM (*Autoregressive Distributed Lag- Error Correction Model*) didapatkan output estimasi yang akan dibahas dengan argumentasi sesuai dengan kondisi dan fakta yang terjadi. Hal ini diperlukan agar hasil dan penjelasan penelitian dapat dilihat secara komprehensif. Pada penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder dari lima kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Peneliti melakukan penelitian tentang pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan hukum wagner dan teori keynes dikarenakan dari hasil penelitian sebelumnya muncul perdebatan mengenai hukum wagner dan teori keynes yang masih jauh dari penyelesaian, sehingga perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dan hukum apa yang berlaku di Provinsi Jawa Timur hukum wagner atau teori keynes.

4.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur

Kondisi masyarakat merupakan suatu yang hal yang selalu melekat ketika kita akan membahas suatu daerah. Di Provinsi Jawa Timur kondisi masyarakatnya tidak jauh berbeda dengan kondisi masyarakat di daerah lain. Masyarakat Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu masyarakat yang majemuk di Indonesia. Hal Ini dikarenakan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki cukup banyak suku bangsa, serta kondisi ekonomi, pendidikan dan budaya yang

lebih baik. Alasan tersebut dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat luar Provinsi Jawa Timur untuk datang dan menetap di Provinsi Jawa Timur.

4.1. 1 Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang perekonomiannya cukup baik. Menurut laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jawa Timur Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA) menyatakan bahwa perekonomian Jawa Timur pada tahun 2019 tumbuh mencapai 3,68%. Pertumbuhan ini secara umum lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional saat itu yang hanya mencapai 5,83%¹⁴. Melihat paparan tersebut tak ayal bahwa provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang perekonomiannya selalu masuk dalam sepuluh besar di seluruh Indonesia, serta berada pada posisi kedua tertinggi di Jawa Timur (MPR RI, 2018). Pertumbuhan perekonomian yang baik di Provinsi Jawa Timur secara tidak langsung dipengaruhi oleh banyaknya industri di Provinsi Jawa Timur. Industri-industri yang ada di Provinsi Jawa Timur di antaranya industri tekstil, rokok, peternakan, dan pertanian. Pertanian di Provinsi Jawa Timur merupakan sektor yang paling lamban dalam sumbangsuhnya untuk perekonomian Provinsi Jawa Timur. Sekalipun seperti di atas, tidak lantas tidak ada permasalahan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur sekalipun pertumbuhan ekonominya baik tetap menyimpan permasalahan yaitu Tingkat kemiskinan (Ginting, 2019) Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur hingga tahun 2019 mencapai 2,33% (Moh. Toriq Alfian & Muhammad Yasin, 2023). Hal Ini diperkirakan dapat terus menurun sesuai dengan berjalannya waktu. Apalagi melihat kondisi perekonomian

sekarang ini, diperkirakan Tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur akan terus menurun.

4.1.2 Pengeluaran Pemerintah

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting bagi kemajuan suatu bangsa. Hal tersebut provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang mempunyai pendidikan yang cukup memadai. Di daerah ini terdapat beberapa perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang baik. Banyaknya perguruan tinggi negeri ini secara tidak langsung menarik minat para pendatang untuk datang ke Provinsi Jawa Timur guna menuntut ilmu. Tak hanya orang luar Provinsi Jawa Timur, masyarakat Provinsi Jawa Timur juga berbondong-bondong menginginkan anaknya untuk bisa merasakan pendidikan perguruan tinggi yang ada. Dewasa ini pendidikan masyarakat di Jawa Timur dapat dibilang cukup bagus. Hal Itu dikarenakan hampir semua lapisan masyarakat dewasa ini telah dapat merasakan sekolah mulai dari SD, SMP, SMA/SMK, bahkan Perguruan Tinggi. Sekalipun begitu, masih ada di beberapa daerah di Jawa Timur yang belum bisa menikmati fasilitas pendidikan. Akibatnya di Jawa Timur angka buta aksaran masih tinggi. Menurut data sensus penduduk tahun 2010 ada sekitar 3,4 juta jiwa (BPS. 2020). Hal ini dapat di tinjau dari pengeluaran pemerintah baik dari sisi belanja guna pembangunan fisik maupun non-fisik seperti Pendidikan.

Schultz dalam Jhinghan (2002) mengemukakan bahwa fasilitas dan pelayanan kesehatan, pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina tenaga serta vitalitas rakyat. Meier, et al (Winarti, 2014), suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang

pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan. Meier, et al (Winarti, 2014), suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan. Isu mengenai sumber daya manusia (*human capital*) sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pada tahun 1776 yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara dengan memberikan dua faktor yaitu: pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian dan kualitas manusia (Khusaini dalam Syam, 2014). Menurut Hasibuan (1996) peningkatan efisiensi, khususnya efisiensi masyarakat dengan cara meningkatkan investasi di sektor pendidikan, sehingga terdapat keseimbangan yang lebih serasi antara investasi bagi sumber daya manusia dan investasi bagi modal fisik.

4.1.3 Tingkat Kemiskinan

Kata miskin diidentikkan dengan kondisi seseorang yang tidak berharta, serba kekurangan, sedangkan kemiskinan adalah hal miskin atau keadaan kemiskinan, artinya situasi penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan kehidupan yang minimum. Kemiskinan merupakan masalah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, antara lain tingkat pendapatan, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, inflasi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Di Indonesia pengukuran seseorang untuk dikatakan miskin ialah menurut standar penentu yang diberikan oleh BPS. Kriteria yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur garis kemiskinan tersebut adalah pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tersebut.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2006, Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 21,09%. Pada tahun 2007, Tingkat kemiskinan menurun menjadi 19,98%, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2017 sebesar 11,20%. Penurunan ini terjadi karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur gencar melakukan program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan. Pertama, Program Bantuan Pangan/Beras, Bantuan Khusus Siswa Miskin atau BKSM, Bosda Madin dan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui beberapa strategi di antaranya Jalinmantra, Anti *Poverty Program*, serta adanya koperasi wanita dan koperasi pondok pesantren. Sedangkan program ketiga yakni sinergitas program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah melalui Program Keluarga Harapan atau PKH, beras Sejahtera atau rastra dan Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Marlina & Usman, 2020).

4.2 Hasil dan Analisis

Bagian ini merupakan penjabaran metode dan alat analisis yang digunakan dalam pengolahan data, dengan metode ARDL dan dengan dibantu alat analisis yaitu Eviews9.

4.2.1 Uji Stasioneritas Data

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian pada umumnya cenderung mempunyai tren yang akan menyebabkan data tidak stasioner. Data yang tidak stasioner akan menyebabkan regresi lancung (*spurious regression*), akibatnya estimasi yang dihasilkan akan tidak akurat, untuk mendapatkan estimasi yang baik maka data yang digunakan harus stasioner. Sehingga, langkah yang dilakukan

dalam pengolahan data adalah dengan melakukan uji akar unit (*unit root test*) dengan menggunakan metode *Augmented Dickey-Fuller* (ADF).

a. Variabel Tingkat Kemiskinan

Tabel 4.1 Variabel Tingkat Kemiskinan

Method	Statistic	Prob.**
ADF - Fisher Chi-square	255.180	0.0000
ADF - Choi Z-stat	-10.7873	0.0000

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan data di atas nilai probabilitas pada uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) sebesar 0,0000 yang jauh lebih kecil dari α (5%), sehingga harus menolak H_0 yang menyatakan ada masalah *unit root* dalam model autoregresif. Dengan demikian data dinyatakan stasioner dan signifikan pada *Level-intercept*. Maka tidak perlu dilakukan uji kointegrasi, karena uji ini stasioner pada tingkat level.

b. Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4.2 Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Method	Statistic	Prob.**
ADF - Fisher Chi-square	140.171	0.0000
ADF - Choi Z-stat	-5.96262	0.0000

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan data di atas nilai probabilitas pada uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) sebesar 0,0000 yang jauh lebih kecil dari α (1%, 5%, 10%), sehingga harus menolak H_0 yang menyatakan ada masalah *unit root* dalam model autoregresif. Dengan demikian data dinyatakan stasioner dan signifikan pada *Level-intercept*.

Maka tidak perlu dilakukan uji kointegrasi, karena uji ini stasioner berada pada tingkat level.

c. Variabel Pengeluaran Pemerintah

Tabel 4.3 Variabel Pengeluaran Pemerintah

Method	Statistic	Prob.**
ADF - Fisher Chi-square	155.724	0.0000
ADF - Choi Z-stat	-6.77080	0.0000

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan data di atas nilai probabilitas p ada uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) sebesar 0,0000 yang jauh lebih kecil dari α 5%, sehingga harus menolak H_0 yang menyatakan ada masalah *unit root* dalam model autoregresif. Dengan demikian data dinyatakan stasioner dan signifikan pada *Level-intercept*. Maka tidak perlu dilakukan uji kointegrasi, karena uji ini stasioner berada pada tingkat level.

4.2.2 Penentuan Panjang *Lag Optimum*

Penelitian ini mencari penentuan optimum lag diuji melalui *Akaike Information Criteria* (AIC) yang paling rendah atau minimum. Penentuan lag optimal merupakan hal penting dalam permodelan VAR. Jika lag optimal yang dimasukkan terlalu pendek maka di khawatirkan tidak dapat menjelaskan kedinamisan model secara menyeluruh. Namun, lag optimal yang terlalu panjang akan menghasilkan estimasi yang tidak efisien karena berkurangnya *degree of freedom* (terutama model dengan sampel kecil).

Tabel. 4.4 Penentuan Panjang *Lag Optimum*

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-5333.383	NA	5.34e+13	40.12318	40.16360	40.13942
1	-5282.748	99.74832	3.91e+13	39.81013	39.97179	39.87508
2	-5207.024	147.4619*	2.37e+13*	39.30845*	39.59136*	39.42210*

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Lag 2 memiliki nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) terkecil. Artinya pengaruh optimal variabel terhadap variabel lain terjadi dalam horizon waktu 2 periode diketahui dari tanda bintang yang paling banyak. Dengan begitu *lag optimal* yang disarankan adalah lag 2.

4.2.3 Hasil ARDL-ECM (*Autoregressive Distributed Lag- Error Correction Model*)

Dalam pengujian *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) menggunakan lag dalam pengujiannya. Uji ini menggunakan aplikasi *software Eviews 9* saat menganalisis dan menguji dengan *Akaike Information Criterion* (AIC).

Tabel 4.5 Hasil Uji Estimasi *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
Long Run Equation				
LN_PE	-0.008358	0.024958	-0.334893	0.7380
LN_BM	1.755598	0.180824	9.708852	0.0000
LN_BS	0.095265	0.021282	4.476206	0.0000
Short Run Equation				
COINTEQ01	-0.223051	0.031267	-7.133774	0.0000
D(LN_PE)	0.049019	0.009728	5.038884	0.0000
D(LN_BM)	-0.337617	0.201669	-1.674113	0.0955
D(LN_BS)	-0.101819	0.094935	-1.072515	0.2846
C	0.189395	0.214128	0.884493	0.3774
Root MSE	0.394458	Mean dependent var		-0.261114
S.D. dependent var	0.623391	S.E. of regression		0.538760
Akaike info criterion	1.456243	Sum squared resid		64.72848
Schwarz criterion	3.326248	Log likelihood		-109.8985
Hannan-Quinn criter.	2.195637			

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model selection.

Sumber: Data Diolah, 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat hasil seleksi model ARDL yaitu (4,4,0,4). Artinya variabel belanja langsung (LnBL), belanja tidak langsung (LnBTL), dan tenaga kerja (LnTK) berada pada lag 4. Variabel pembentukan modal tetap bruto (LnPMTB) berada pada lag 0. *R-squared* pada pengujian ini didapat hasil sebesar 0.830428 atau dapat diterjemahkan 83,04% variabel laju pertumbuhan ekonomi (PE) di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh variabel independent yaitu belanja langsung (LnBL), belanja tidak langsung (LnBTL), Pembentukan Modal Tetap Bruto (LnPMTB), tenaga kerja (LnTK). Sedangkan 16,96% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model tersebut.

4.2.5 Hasil Uji Kausalitas

Uji kausalitas granger antar variabel penelitian dimaksud untuk mengetahui hubungan kausalitas antara variabel. Dari tabel berikut ini hasil uji tersebut dapat diketahui adanya hubungan timbal balik.

Tabel 4.6 Hasil Uji Kausalitas

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
PDRB ADHK does not Granger Cause KEMISKINAN	304	2.68120	0.0701
KEMISKINAN does not Granger Cause PDRB ADHK		4.11518	0.0173
PENGELUARAN_PEMERINTAH does not Granger Cause KEMISKINAN	304	1.86707	0.1564
KEMISKINAN does not Granger Cause PENGELUARAN PEMERINTAH		0.29488	0.7448
PENGELUARAN PEMERINTAH does not Granger Cause PDRB ADHK	304	9.76074	8.E-05
PDRB ADHK does not Granger Cause PENGELUARAN PEMERINTAH		6.29155	0.0021

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Pada tabel di atas variabel kemiskinan tidak memiliki hubungan dengan variabel pertumbuhan ekonomi dengan signifikan pada level 5% (probability 0,0693 > 0,05), dan variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki hubungan

dengan kemiskinan dengan signifikan pada level 5% (probability $0,2344 > 0,05$), pada lag 4. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi periode yang lalu tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kemiskinan atau tidak terdapat kausalitas dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

- b. Pada tabel di atas variabel kemiskinan memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi dengan signifikan pada level 5% (probability $0.0069 < 0,05$), pada lag 4. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi periode yang lalu mempengaruhi secara signifikan terhadap kemiskinan atau terdapat kausalitas satu arah antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah.
- c. Pada tabel di atas variabel pengeluaran pemerintah memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi dengan signifikan pada level 5% (probability $0.0014 < 0,05$), pada lag 4. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi periode yang lalu mempengaruhi secara signifikan terhadap pengeluaran pemerintah atau terdapat kausalitas satu arah antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah.
- d. d. Pada tabel di atas variabel pengeluaran pemerintah memiliki hubungan dengan kemiskinan dengan signifikan pada level 5% (probability $0.0090 < 0,05$), pada lag 4. Artinya bahwa kemiskinan periode yang lalu mempengaruhi secara signifikan terhadap pengeluaran pemerintah atau terdapat kausalitas satu arah antara kemiskinan dan pengeluaran pemerintah.
- e. Pada tabel di atas variabel pengeluaran pemerintah tidak memiliki hubungan dengan kemiskinan dengan signifikan pada level 5% (probability $0.8736 > 0,05$), dan variabel kemiskinan tidak memiliki hubungan dengan pengeluaran

pemerintah dengan signifikan pada level 5% (probability 0,7692 >0,05), pada lag 4. Artinya bahwa kemiskinan periode yang lalu tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pengeluaran pemerintah atau tidak terdapat kausalitas dua arah antara kemiskinan dan pengeluaran pemerintah.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Adapun pembahasan hasil dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Variabel belanja langsung (BL) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PE) dalam jangka pendek dan memiliki pengaruh yang negatif dalam jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien 7.600231 yang menunjukkan nilai yang positif dan nilai probabilitas 0.0000 yang signifikan pada tingkat 5%. Dan dalam jangka panjang, hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien -5.446968 yang menunjukkan nilai yang negatif dan nilai probabilitas 0.0503 yang signifikan pada tingkat 5%.

Pengaruh positif belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timurselama jangka pendek dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnadi et al., (2016) yang berjudul Analisis Pengaruh Belanja Langsung Pada Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Bali yang menunjukkan bahwa belanja langsung berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Namun dampak positif ini hanya berlangsung sementara, dalam jangka panjang belanja langsung di Provinsi Bali berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa belanja langsung berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang

dikarenakan dalam Laporan Perekonomian Jawa Timur tahun 2020 serapan belanja langsung rendah dikarenakan dampak dari masa pandemic Covid-19, sehingga beberapa kegiatan program tidak dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran untuk *refocusing* penanganan Covid-19 (Engel, 2020)

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat dan capaian kinerjanya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam kualitas pelayanan publik, dan keberpihakkan pemerintah daerah kepada kepentingan publik (Paseki et al., 2014)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan pada analisis data dapat disimpulkan bahwa variabel belanja langsung (BL) berpengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (PE) dalam jangka pendek dan memiliki pengaruh negatif dalam jangka panjang di Provinsi Jawa Timur.
2. Berdasarkan pada analisis data dapat disimpulkan variabel belanja tidak langsung (BTL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (PE) dalam jangka pendek dan memiliki pengaruh positif dalam jangka panjang di Provinsi Jawa Timur.
3. Berdasarkan pada analisis data dapat disimpulkan variabel pembentukan modal tetap bruto (PMTB) berpengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (PE) di Provinsi Jawa Timur dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang.
4. Berdasarkan pada analisis data dapat disimpulkan variabel tenaga kerja (TK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (PE) dalam jangka pendek dan memiliki pengaruh negatif dalam jangka panjang di Provinsi Jawa Timur.
5. Berdasarkan pada analisis data menunjukkan bahwa terdapat hubungan kasualitas satu arah antara belanja langsung (BL) dan belanja tidak langsung (BTL) terhadap pertumbuhan ekonomi (PE) sehingga penelitian ini mendukung Teory Keynes.

6. Rekomendasi

Perlu dilakukan kajian–kajian lanjutan dengan menggunakan variabel–variabel diluar dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan adanya hubungan sebab-akibat dan hubungan jangka panjang antara Tingkat kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi, diharapkan pemerintah melalui pengeluaran pemerintah dapat mengupayakan tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, K. K., & Scott, J. (2022). A study of the capabilities and limitations of local governments in providing community services in Nepal. *Public Administration and Policy*, 25(1), 64–77. <https://doi.org/10.1108/PAP-01-2022-0006>
- Adriani, S. (2020). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi , Kemiskinan , Pendidikan dan*. 2(September), 45–50.
- Aziz, G. A., Rochaida, E., & Warsilan. (2016). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, 12(1), 29–48.
- Azwar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2), 149–167. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.186>
- Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. (2021). Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Timur Triwulan 1 Tahun 2021. *Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Timur*, 1–39.
- Donkor, M., Kong, Y., Manu, E. K., Ntarmah, A. H., & Appiah-Twum, F. (2022). Economic Growth and Environmental Quality: Analysis of Government Expenditure and the Causal Effect. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(17). <https://doi.org/10.3390/ijerph191710629>
- Ginting, A. L. (2019). Interelasi Pengeluaran Pemerintah dan Kesempatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(2), 230. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i2.10957>
- Hanifah, N. B., Kadir, S. A., & Yulianita, A. (2017). Analisis Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 15–34. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep/article/view/8779%0Ahttps://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep/article/viewFile/8779/4669>
- Liu, Y., Liu, J., & Zhou, Y. (2017). Spatio-temporal patterns of rural poverty in China and targeted poverty alleviation strategies. *Journal of Rural Studies*, 52, 66–75. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.04.002>
- Marlina, M., & Usman, U. (2020). Pengaruh Pdrb Dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua Terhadap Kemiskinan Di Papua. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(2), 15. <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i2.3202>
- Maulana, Y. S., Bina, U., Informatika, S., Munawar, A. H., Siliwangi, U.,

- Wibisono, T., Bina, U., Informatika, S., & Hadiani, D. (2020). *Location Quotient Analysis (LQ) in Determining t he Excellent Commodity*. 27(ICoSHEET 2019), 65–68.
- Moh. Toriq Alfian, & Muhammad Yasin. (2023). Analisis Fungsi Pengeluaran Pemerintah Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 101–107. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1129>
- MPR RI. (2018). *Kajian Akademik: Pelaksanaan Otonomi Daerah* (T. Andana, S. Aminah, O. T. Setiawan, & P. D. Dukarno (eds.); Pertama). Badan Pengkajian MPR RI.
- Normalia, N. (2022). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014-2020 Perspektif Ekonomi Islam Skripsi*. [http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/19468%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/19468/1/PUSAT BAB 1 DAN 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/19468%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/19468/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf)
- Sari, Y., Winarni, E., & Amali, M. (2021). Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Belanja Modal Di Provinsi.Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 565. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.415>
- Tampubulon, E. G., Irvan, M., & Hartono, D. (2022). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2020. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 9(1), 68–80.
- Uswatun Hasanah, L., Hodijah, S., & Safri, M. (2022). Kausalitas antara pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan indeks pembagunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(2), 273–288. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i2.19620>
- Zhuchenko, S., Kubaščíkova, Z., Samoilikova, A., Samoilikova, A., Vasylieva, T., & D'yakonova, I. (2023). Economic growth and housing spending within social protection: Correlation and causal study. *Public and Municipal Finance*, 12(1), 73–85. [https://doi.org/10.21511/pmf.12\(1\).2023.07](https://doi.org/10.21511/pmf.12(1).2023.07)

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1. Bukti *Submit* Artikel

The screenshot shows a web browser window with the URL `journal.unimma.ac.id/index.php/bisnisekonomi/authorDashboard/submission/8265`. The page is the author dashboard for the journal "Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi". The submission title is "Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah, Hukum Weiger dan Teori Keynes". The submission is in the "Review" stage. The submission files section shows a file named "ell_f9, Artikel Jurnal UNIMMA Erika Febrianti_UNDIP.docx (4)" with a file size of 29393-4. The pre-review discussions section shows a comment from "ell_f9" with 0 replies.

Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi Tasks 0 English View Site ell_f9

Submission Library View Metadata

Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah, Hukum Weiger dan Teori Keynes

Submission Review Copyediting Production

Submission Files Search

29393-4	ell_f9, Artikel Jurnal UNIMMA Erika Febrianti_UNDIP.docx (4)	Article Text
---------	--	--------------

Download All Files

Pre-Review Discussions Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
Comments for the Editor	ell_f9	-	0	☐

Lampiran 3. OJS Terindeks SINTA



The image shows the SINTA (Sistem Informasi Naskah Tesis dan Artikel) profile for Universitas Muhammadiyah Magelang. At the top is the university's logo, a circular emblem with a sunburst and the text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG'. Below the logo, the university's name is displayed in bold, followed by its acronym 'UNIMMA', location 'KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH, ID', and ID 'ID : 17' and CODE '061004'. The profile features three main statistics: 179 Authors, 22 Departments, and 14 Journals, each with a corresponding icon and a right-pointing arrow. At the bottom, four SINTA scores are listed: SINTA Score Overall (163.118), SINTA Score 3Yr (94.200), SINTA Score Productivity (960), and SINTA Score Productivity 3Yr (554), each with a person icon and a graduation cap icon.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
UNIMMA KOTA MAGELANG - JAWA TENGAH, ID
ID : 17 <> CODE : 061004

179 Authors
22 Departments
14 Journals

163.118 SINTA Score Overall
94.200 SINTA Score 3Yr
960 SINTA Score Productivity
554 SINTA Score Productivity 3Yr



The image shows the SINTA profile for the journal 'Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi'. The header features the journal's logo, which includes a stylized building and an open book, followed by the title 'JURNAL ANALISIS BISNIS EKONOMI' in bold. Below the logo, the journal's affiliation 'FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG' is listed, along with its P-ISSN (16935950), E-ISSN (2579647X), and Subject Area (Economy). The profile displays three key metrics: 4.66667 Impact, 1192 Google Citations, and Sinta 2 Current Accreditation, each with a corresponding icon (people, building, and star). At the bottom, four links are provided: Google Scholar, Garuda, Website, and Editor URL, each with a small icon.

JURNAL ANALISIS BISNIS EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
P-ISSN : 16935950 <> E-ISSN : 2579647X Subject Area : Economy

4.66667 Impact
1192 Google Citations
Sinta 2 Current Accreditation

Google Scholar Garuda Website Editor URL